



## Pengaturan Lembaga Penyiaran Publik

Handrini Ardiyanti<sup>\*)</sup>

### Abstrak

*Keberadaan lembaga penyiaran publik perlu diatur secara jelas dan terinci demi menjamin terlaksananya tugas-tugas lembaga penyiaran yang harus mengutamakan kepentingan publik, dan eksistensinya lembaga penyiaran sebagai sebuah industri padat modal.*

### Pendahuluan

Wacana untuk memisahkan pengaturan tentang Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai lembaga penyiaran publik dalam satu undang-undang tersendiri mulai bergulir. Bahkan Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq dalam Rakernas LPP RRI di Mataram, NTB, Selasa (10/1) mengatakan, DPR akan membuat UU LPP RRI dan TVRI yang sangat dibutuhkan tidak saja bagi RRI dan TVRI, namun juga sangat penting bagi negara. Demikian pula dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyiaran Komisi I Rabu (11/01).

Keberadaan lembaga penyiaran publik mutlak diperlukan dalam sebuah negara demokratis demi terjaminnya hak rakyat untuk mendapatkan informasi agar dapat memainkan peranan sentral dalam keseluruhan proses politik. Namun bagaimana pengaturan keberadaan dan kelembagaan lembaga penyiaran publik dalam peraturan perundang-undangan,

memerlukan kecermatan, agar tetap dapat menjamin perannya sebagai lembaga penyiaran yang mengutamakan kepentingan publik sebagai masyarakat sekaligus tetap eksis sebagai sebuah industri padat modal.

### Pemahaman tentang Lembaga Penyiaran Publik

Menurut Ghazali, 2002, lembaga penyiaran publik secara khusus didefinisikan sebagai lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau penyiaran televisi atau penyiaran berlangganan yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi publik melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Berbeda dengan lembaga penyiaran komersial yang mengutamakan economic *determinism*, di mana seolah-olah semua aspek tingkah laku institusi penyiaran ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi

<sup>\*)</sup> Peneliti Muda Bidang Komunikasi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: handrini@gmail.com

**Tabel 1.**  
**Perbedaan Lembaga Penyiaran Komersial dengan Lembaga Penyiaran Publik**

Aspek	Lembaga Penyiaran Komersial	Lembaga Penyiaran Publik
Konsep	Market Model yaitu sebagai industri yang menjual produk.	Public Sphere Model yaitu sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki masyarakat yang melayani masyarakat dengan menyajikan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat
Posisi audiens	Sebagai konsumen	Sebagai masyarakat
Definisi	Mendasarkan operasinya atas prinsi-prinsip pencapaian keuntungan ekonomi (komersial)	Memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi publik melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.
Khalayak	Umum, terbuka lebar	Umum, lebih satu komunitas.
Visi	Memberikan hiburan, informasi dan pendidikan. Implementasinya untuk produksi dan pemasaran dengan memperhitungkan prinsip-prinsip capaian keuntungan ekonomi (komersial).	Meningkatkan kualitas hidup publik. Secara khusus meningkatkan apresiasi terhadap keaneka-ragaman yang ada ditengah masyarakat dengan harapan menciptakan kehidupan yang harmonis di antara berbagai komunitas yang berbeda.
Ukuran Kesuksesan	Rating	Kepuasan Publik
Pemilik	Umumnya berbentuk perseroan terbatas	Negara, PT, Pemda, non pemerintah (swasta), yayasan, LSM, Perguruan Tinggi, dll namun tetap harus membentuk Lembaga Supervisi yang independen.
Sumber Pemasukan	Iklan	APBN, APBD, iuran, iklan dan sumber lain yang dikembangkan

Diolah berdasarkan Diagram Penggolongan Lembaga Penyiaran (Ghazali, 2002) dan Tabel Market Model Versus Public Sphere (Croteau & Hoynes , 2006)

dengan logika *never-ending circuit of capital accumulation* : MCM (*Money – Commodities – More Money*) - lembaga penyiaran publik menitikberatkan perhatian kepada kepentingan dan kepuasan publik sebagai tolok ukur keberhasilan program.

## Lembaga Penyiaran Publik di Berbagai Negara

Menurut UNESCO saat ini hampir seluruh negara pemerintahnya telah mengembangkan keberadaan lembaga penyiaran publik sebagai media alternatif di tengah dominasi media yang bersifat

komersil untuk mendorong akses dan partisipasi publik. Sebab lembaga penyiaran publik melalui program-programnya yang diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan serta mendorong partisipasi publik.

## Pengaturan Lembaga Penyiaran Publik

Pengaturan keberadaan dan operasionalisasi lembaga penyiaran publik berbeda-beda sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Di Korea misalnya, KBS yang semula merupakan milik pemerintah dengan nama *Seoul TV Broadcasting Station* menjadi penyiaran publik sejak 3 Maret 1973 ini diperbolehkan menerima iklan pada tahun 1980, namun sejak tahun 1994 KBS tidak lagi menayangkan iklan seiring telah direvisinya kebijakan sistem pengumpulan iuran televisi oleh pemerintah. Sedangkan *Munhwa Broadcasting Corporation* (MBC)

**Tabel 2.**  
**Lembaga Penyiaran Publik di Berbagai Negara**

No	Negara	Lembaga Penyiaran Publik (Public Broadcasting)
1.	Korea Selatan	Korean Broadcasting System (KBS), Munwha Broadcasting Corporation (MBC), Education Broadcasting System (EBS)
2.	Amerika Serikat	National Public Radio, Public Broadcasting Service, Wisconsin Public Television, Minnesota Public Radio
3.	Canada	Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
4.	Inggris	British Broadcasting Corporation (BBC)
5.	Jepang	NHK (Japan Broadcasting Corporation)
6.	Perancis	Radiodiffusion-Television (RTF)

Diolah dari TVRI Sebagai Media Komunikasi Pembangunan (Gayatri, 2011)

**Tabel 1.**  
**Perbedaan Lembaga Penyiaran Komersial dengan**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

Tentang	Pengaturan
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berbentuk korporasi dengan pengorganisasian terdiri dari auditor, dewan direksi, direktur, ketua dewan, presiden CBC dan anak perusahaan CBC.</li> <li>Ketua Dewan Direksi dan presiden direktur CBC yang dipilih dari ke-12 direksi oleh Gubernur Jenderal Kanada.</li> <li>Jika Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan atau jika kosong, maka Presiden harus bertindak sebagai Presiden Direktur, dan jika keduanya tidak ada maka Dewan dapat memilih seorang direktur untuk bertindak sebagai Presiden. Namun tidak memiliki kewenangan sebagai Presiden melebihi enam puluh hari tanpa persetujuan dari Gubernur Jenderal.</li> </ul>
Tugas dan Kewenangan	<p>Tugas CBC adalah menyediakan program siaran sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Komisi Penyiaran Kanada antara lain mengumpulkan berita yang berkaitan dengan kejadian saat ini di setiap bagian dari dunia dan membangun dan berlangganan kantor berita, memproduksi, mendistribusikan dan melestarikan berbagai produk-produk penyiaran, mendapatkan keuntungan dari usaha penyiaran baik dengan sewa atau pembelian.</p> <p>Kewenangan CBC membuat perjanjian atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain terkait dengan penyediaan jasa penyiaran dan lainnya serta melakukan kontrak-kontrak bisnis terkait dengan penyiaran mewakili ratu.</p>
Tugas dan kewajiban Auditor, Presiden Direktur, Direksi dll	<p>Auditor bertugas melakukan verifikasi korporasi, Dewan Direksi Korporasi yang terdiri dari 12 Direksi termasuk di dalamnya Ketua Dewan Direksi, Direktur yang bertugas sesuai dengan pengaturan administrasi korporasi, presiden atau direktur umum korporasi serta anak perusahaan yang dimiliki CBC.</p> <p>Ketua Dewan Direksi harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara rutin minimal secara paruh waktu.</p>
Masa Jabatan	Masa Jabatan direksi adalah lima tahun dan sewaktu-waktu dapat diganti oleh Gubernur Jenderal terkait kasus-kasus tertentu.
Staffing	Dewan Direksi CBC memiliki kebebasan untuk merekrut staff termasuk di dalamnya persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Renumerasi	Dewan Direksi CBC memiliki kebebasan untuk mengatur remunerasi
Kedudukan	Kedudukan kantor pusat korporasi yang diatur harus berada di Ibu Kota negara serta pengaturan tentang pertemuan Dewan Direksi CBC minimal enam kali dalam setahun.
Pengaturan Sebagai Entitas Bisnis	Terdapat ketentuan tentang akuisisi dan tata cara melakukan perjanjian bisnis termasuk di dalamnya mekanisme pinjaman yang harus mendapatkan persetujuan menteri keuangan.
Pertanggungjawaban	Korporasi bertanggung jawab kepada parlemen yang dilakukan melalui Perdana Menteri. mekanisme laporan keuangan CBC yang disampaikan kepada Parlemen melalui menteri paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya satu tahun anggaran.
Jaminan Independensi	Terdapat penegasan dalam satu pasal tersendiri bahwa keberadaan CBC sebagai korporasi tidak berarti ditafsirkan atau diterapkan sehingga dapat membatasi kebebasan ekspresi atau kemerdekaan, jurnalistik kreatif atau pemrograman serta penegasan kebebasan jurnalistik tetap dapat dinikmati oleh korporasi meski dalam pelaksanaan tugas-tugasnya korporasi tetap mengejar keuntungan.

Diolah UU Penyiaran Kanada

yang merupakan lembaga penyiaran publik dengan sistem jaringan dengan 19 stasiun lokal yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh organisasi nirlaba (LSM) *Foundation for Broadcast Culture* ini menerapkan kebijakan mengizinkan pemasangan iklan.

Pengaturan keberadaan dan operasionalisasi lembaga penyiaran publik biasanya menyatu dengan UU Penyiaran. UU Penyiaran Inggris misalnya memasukan pengaturan tentang BBC (*The British Broadcasting Corporation*) dalam satu bab khusus yaitu pada bab VI yang mengatur tentang tugas dan kewenangan BBC, kewenangan Sekretaris Negara terkait dengan BBC.

Namun di antara sekian banyak regulasi terkait keberadaan lembaga penyiaran publik, UU Penyiaran Kanada merupakan salah satu undang-undang yang mengatur secara singkat dan komprehensif tentang keberadaan lembaga penyiaran publik baik dalam kerangka melayani kepentingan audiens sebagai masyarakat maupun keberadaannya sebagai industri.

### **Pengaturan Lembaga Penyiaran Publik dalam UU Penyiaran Kanada**

Lembaga penyiaran publik yang merupakan milik negara di Kanada adalah *Canadian Broadcasting Corporation* (CBC Radio and Television). Pengaturan tentang CBC diatur menjadi satu ke dalam UU Penyiaran (*Broadcasting Act, Statue of Canada 1991*)

yang diatur dalam 36 pasal yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 71 dalam bagian III sesudah pengaturan tentang kebijakan umum penyiaran di Kanada dan pengaturan tentang Komisi Penyiaran Kanada.

## Penutup

Pengaturan tentang kelembagaan penyiaran publik mutlak dilakukan dalam sebuah negara demokratis demi menjamin keberadaannya, namun yang harus digarisbawahi adalah pengaturan lembaga penyiaran publik hendaknya tidak terlepas dari kenyataan bahwa industri penyiaran merupakan industri yang padat modal dengan mengadopsi susunan kelembagaan sesuai dengan entitas bisnis yang ada sebagaimana dilakukan dalam UU Penyiaran Kanada yang memberikan keleluasaan kepada Dewan Direksi CBC untuk mengatur remunerasi serta merekrut staff termasuk di dalamnya persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu pengaturan tentang lembaga penyiaran publik milik negara harus memberikan penegasan bahwa sisi komersial lembaga penyiaran sebagai sebuah industri tetap harus mendapat perhatian dengan cara mengatur tentang berbagai mekanisme admistrasi keuangan lembaga sebagai sebuah institusi bisnis sekaligus tetap menegaskan bahwa keberadaan lembaga penyiaran publik sebagai sebuah entitas bisnis tidak akan mempengaruhi fungsi dari keberadaan lembaga penyiaran tersebut sebagai lembaga penyiaran publik yang dijamin kemerdekaan dan independensinya sebagaimana pengaturan yang terdapat dalam pengaturan tentang lembaga penyiaran publik milik negara yang ada sebagaimana dinyatakan dalam pasal 70 UU Penyiaran Kanada.

Hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam pengaturan lembaga penyiaran publik adalah tetap menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dasar penyiaran publik yaitu lebih mengutamakan program-program yang berkualitas, menjangkau seluruh lapisan

masyarakat dan seluruh wilayah negara, merefleksikan keanekaragaman budaya serta mencerminkan identitas nasional.

## Rujukan:

1. Effendi Gazali, *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak, Sebuah Acuan tentang penyiaran Publik dan Komunitas*, Penerbit Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI, Jakarta, 2002.
2. UU Penyiaran Kanada (*Broadcasting Act, Statue of Canada 1991*), Departemen Kehakiman Kanada, <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/B-9.01/> diakses pada Kamis, 12 Januari 2012.
3. UU Administrasi Keuangan Kanada (*Financial Administration Act, Revised Statue of Canada 1985*), Departemen Kehakiman Kanada, <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/F-11> diakses pada Kamis, 12 Januari 2012.
4. "Komisi I DPR : Kita Sepakat Bikin UU RRI dan TVRI", <http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/7141> diakses Jumat, 13 Januari 2011.
5. Gati Gayatri, *TVRI Sebagai Media Komunikasi Pembangunan*, 2011.
6. *Market Model Versus Public Sphere by Croteau & Hoynes* dalam <http://budiafriyan.wordpress.com/2006/01/16/market-model-versus-public-sphere-model-of-mass-media/> diakses Senin, 2 Oktober 2011.
7. "Korean Broadcasting System" [http://id.wikipedia.org/wiki/Korean\\_Broadcasting\\_System](http://id.wikipedia.org/wiki/Korean_Broadcasting_System) diakses Selasa, 17 Januari 2011.
8. "Munhwa Broadcasting Corporation" [http://id.wikipedia.org/wiki/Munhwa\\_Broadcasting\\_Corporation](http://id.wikipedia.org/wiki/Munhwa_Broadcasting_Corporation) diakses Selasa, 17 Januari 2011.
9. *Public Broadcasting, Why? How?* UNESCO. (2001) <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124058eo.pdf>, 16 November 2011.